

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PERS DALAM
KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS
KETIDAKOBJEKTIFAN LIPUTAN DALAM KONFLIK ISRAEL-
PALESTINA)**

Oleh

Dewa Ayu Diah Ambarawati A.P, NIM 2114101148

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang terdiri atas: 1) menganalisis melalui perspektif hukum, khususnya dalam sisi hukum internasional terhadap pemenuhan kewajiban pers di lapangan dalam meliput konflik bersenjata internasional; dan 2) untuk mengkaji peraturan-peraturan yang telah berlaku dalam skala global maupun lokal, guna memberikan evaluasi pertanggungjawaban pers selaku pelaku atas ketidakobjektifan pemberitaan terutama dalam liputan konflik Israel-Palestina. Sehingga dapat memberikan solusi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme hukum terhadap pelanggaran kewajiban pers yang memberikan dampak-dampak negatif ke beberapa pihak. Kemudian, dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perUUan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan sebagai bahan analisis dan landasan penelitian ini berupa sumber primer, sekunder, dan tersier. Setelah melakukan analisis ditemukan temuan dalam penelitian berupa bahwa benar telah terjadinya ketidakobjektifan oleh pers, sehingga individu maupun kelompok jurnalis memiliki urgensi menjaga konsistensi pelaksanaan kewajiban untuk menyajikan informasi secara objektif memuat fakta di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, dan tidak menentang norma hukum internasional. Ketidakobjektifan liputan konflik Israel-Palestina ini dipengaruhi oleh indikasi keberpihakan yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kepentingan nasional dari masing-masing media. Sikap tidak bertanggungjawabnya pers ini dalam pemberitaan yang bahkan memberikan kerugian masih terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaiannya. Sehingga, pers sebagai lembaga indepen harus menggalakan pengawasan, langkah preventif, dan kolaborasi dengan banyak pihak untuk menegakkan idealisme tersebut.

Kata Kunci: Ketidakobjektifan Pers, Hukum Internasional, Konflik Israel-Palestina.

***JURIDICAL ANALYSIS OF PRESS OBLIGATIONS IN INTERNATIONAL
ARMED CONFLICTS (CASE STUDY OF UNOBJECTIVE COVERAGE IN
THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT)***

By:

Dewa Ayu Diah Ambarawati A.P, NIM 2114101148

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study has two main objectives, which are: 1) analysing, from a legal perspective, particularly in terms of international law, the fulfilment of the media's obligations in the field in covering international armed conflicts; and 2) reviewing existing regulations, both globally and locally, in order to evaluate the media's accountability as actors for the lack of objectivity in reporting, particularly in coverage of the Israeli-Palestinian conflict. Thus, it provides solutions and can be used as a basis for consideration in improving legal mechanisms against media violations that have negative impacts on several parties. To achieve these objectives, this study applies a normative legal research methodology using several approaches, namely: a legislative approach, a case approach, and a historical approach. The legal materials used as the basis for analysis and research include primary, secondary, and tertiary sources. After conducting the analysis, the research findings indicate that there has indeed been a lack of objectivity by the media, so that individuals and groups of journalists have an urgent need to maintain consistency in fulfilling their obligations to present information objectively, based on facts on the ground in accordance with journalistic principles, and not contrary to international legal norms. The lack of objectivity in the coverage of the Israeli-Palestinian conflict is influenced by indications of bias influenced by political, economic, and national interests of each media outlet. The irresponsible attitude of the press in reporting, which even causes harm, still lacks legal resolution. Therefore, the media, as an independent institution, must consistently conduct oversight, take preventive measures, and collaborate with various parties to uphold these ideals.

Keywords: Media Bias, International Law, Israeli-Palestinian Conflict.